

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ditinjau dari aspek manapun merupakan sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak “satu.” Kemajemukan sosial dan budaya Indonesia ditandai dengan banyaknya budaya dan agama di Indonesia. Sebagai contoh budaya Jawa, Sunda, Minahasa, Batak, dan lain-lain. Dari segi agama di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tokoh pertama yang melukiskan tentang kemajemukan bangsa Indonesia adalah Furnivall. Furnivall (1939) sebagaimana dikutip oleh Wirutomo, dkk. (2011:20) dalam hal ini melukiskan kemajemukan bangsa Indonesia pada masa Hindia-Belanda yang ditandai oleh perbedaan etnik yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, namun tidak membaur dan masing-masing memiliki suatu perangkat pranata sosial (sistem keluarga dan kekerabatan, agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya) yang khas; tapi secara formal terpisah dan memenuhi kebutuhannya sendiri (*self contained*) serta tidak memiliki cita-cita yang sama (*common social will*). Menurut Nasikun (2006:34-35), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan adat-istiadat. Sayangnya, implementasi proses kehidupan bermasyarakat di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini (suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sejenisnya) tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pergeseran antar kelompok agama maupun suku, budaya ataupun adat

istiadat yang berbeda seolah menjadi pemicu terjadinya suatu perpecahan horizontal antar masyarakat yang berlainan tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik. Konflik terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Posso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Di Ambon misalnya, konflik awalnya hanya terjadi antara sekelompok orang akhirnya berkembang menjadi konflik antar agama dan menyebar ke daerah-daerah sekitar. Konflik yang terjadi di berbagai daerah ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bahkan korban materi. Dengan adanya konflik ini banyak orang dibunuh dan saling membunuh; banyak orang kehilangan tempat tinggal karena dirusak massa, ada pula yang mengungsi ke pulau-pulau lain. Konflik-konflik ini memang sungguh ironis bagi negara Indonesia yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Tepatlah apa yang dikatakan Syaqq A. Mughni bahwa meskipun secara formal bangsa ini mengakui keragaman, namun dalam kenyataannya tidak (Mahfud, 2009:xi).

Menurut Wirutomo, dkk. (2011:114-115) beberapa faktor utama yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka adalah:

*Pertama*, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi ladang subur untuk mengungkapkan keresahan-keresahan beberapa kelompok etnik yang selama ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. *Kedua*, tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia ternyata disadari atau tidak, terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik. Perebutan sumber daya yang seharusnya berdasarkan kompetisi yang sehat dengan kriteria universal malah menjadi ladang perbenturan nilai-nilai budaya. Pada titik ini, seperti pada masa kolonial, stratifikasi ekonomi tumpang tindih dengan identitas etnik. Tidak terjadi integrasi fungsional di antara beragam kelompok etnik. *Ketiga*, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Indonesia, identitas etnik, dalam hal ini kesukuan termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat, masih menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama di pedesaan.

Fenomena-fenomena konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini mengindikasikan kurangnya toleransi; baik toleransi terhadap agama lain maupun terhadap budaya lain. Toleransi pada hakikatnya adalah sikap dan tindakan yang

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010:9).

Kontras dengan apa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilanda berbagai konflik horizontal, kerukunan masyarakat Sulawesi Utara justru tetap terjaga dengan baik; masyarakatnya tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 2.270.059 jiwa dengan perincian 1.159.903 laki-laki dan 1.110.693 berjenis kelamin perempuan. Sulawesi Utara didominasi oleh Suku Minahasa (33,2%), diikuti Suku Sangir (19,8%), Suku Bolaang Mangondow (11,3%), Suku Gorontalo (7,4%) lalu Suku Totemboan (6,8%) dan Tionghoa (3%). Selain itu terdapat pula Suku Jawa, Bali, Batak, Arab, Maluku, Makasar dan sebagainya. Sementara itu dari segi agama: Protestan (75%), Islam (13%), Katolik (10%), Konghuchu (1%), Budha dan Hindhu (1%). Dari data di atas, nampak jelas bahwa Sulawesi Utara sangat beragam dalam hal suku, agama, bahkan ras.

Karena keharmonisan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Utara di tengah keberagaman suku, agama, ras dan bahasa, maka tidaklah mengherankan jika Sulawesi Utara menjadi barometer dalam hal kerukunan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Banyak pemimpin daerah yang secara khusus datang ke Sulawesi Utara untuk mempelajari secara langsung tentang kerukunan antar umat beragama. Menurut Gara (2009:67) kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara adalah realita. Hal ini diakui baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama (etnis), ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

Fenomena kerukunan yang ditampilkan masyarakat Sulawesi Utara memunculkan pertanyaan mendasar: apa faktor yang menyebabkan sehingga Sulawesi Utara yang secara suku, etnis, agama, bahasa beragam bisa hidup dalam

situasi harmonis? Nilai-nilai sosial budaya apa saja yang ada di dalam masyarakat SULUT yang menjadi perekat sehingga sulit untuk diprovokasi?

Kesimpulan awal yang diperoleh mengapa masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam kerukunan ialah kuatnya nilai-nilai sosial budaya lokal (*local wisdom*) yang menjadi perekat masyarakatnya. Nilai-nilai sosial budaya dominan di Sulawesi Utara adalah budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara*. Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* adalah budaya Minahasa yang paling menonjol menjiwai hidup masyarakat Sulawesi Utara. *Si Tou Timou Tumou Tou* (manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain) merupakan filosofi Sam Ratulangi. Pemikiran filosofis ini mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk hidup dalam kerukunan dengan tujuan untuk memanusiaikan orang lain dan bukan menjadi musuh bagi orang lain (*homo homini lupus*). Sementara itu budaya *Mapalus* merupakan sebuah tradisi budaya suku Minahasa, dimana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama atau secara gotong royong (misalnya dalam mengerjakan kebun). Dalam konsep *Mapalus* yang lebih modern, penerapannya bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; dimana pada waktu orang Kristen merayakan hari raya Natal atau Paskah yang menjaga gereja-gereja adalah pemuda-pemuda Muslim. Begitu pula sebaliknya ketika orang Muslim merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, maka yang ikut menjaga di sekitar Masjid adalah pemuda-pemuda Kristen. Bahkan di Sulawesi Utara ada satu lembaga yang berperan untuk menjaga kerukunan antar agama, yaitu: BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama). Kedua budaya ini dalam perkembangannya dikombinasikan menjadi semboyan masyarakat Sulawesi Utara *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara). Semboyan ini dengan jelas menggambarkan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis, penuh persaudaraan.

Faktor penting yang turut mempengaruhi kuatnya nilai-nilai budaya lokal (*local wisdom*) Sulawesi Utara adalah pewarisan nilai-nilai budaya secara turun temurun atau yang lebih dikenal dengan proses enkulturasi. Koentjaraningrat (2002:233), menyatakan bahwa “dalam proses enkulturasi seorang individu

mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.” Selanjutnya proses enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap dituakan dalam komunitas itu, seperti pewarisan nilai tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses enkulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan untuk disampaikan kepada orang lain yang belum mengenal, penyampaian informasi sekaligus sebagai bentuk kesadaran akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian mengadopsi budaya tersebut untuk dijadikan sebagai budayanya.

Sementara itu menurut Tilaar (2002:54), salah satu proses yang luas dikenal mengenai kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Artinya kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan pendidikan ibarat mata uang yang memiliki dua sisi tapi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hidup dan matinya suatu kebudayaan ditentukan oleh pendidikan.

Di Indonesia pendidikan yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat secara tersirat telah diamanahkan pada implementasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”, lebih lanjut dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:i):

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.” Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Tujuan yang hendak dicapai lewat internalisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Utara dalam konteks pembelajaran PKn di sini adalah untuk pengembangan sikap toleransi siswa agar mereka mampu menyikapi keberagaman secara positif. Sehubungan dengan upaya peningkatan sikap toleransi siswa, Raihani (2011:23) berpendapat:

*Education is seen as the most effective means, in the long term, to enable tolerance to flourish amongst people in a diverse society. School as an educational institution plays a pivotal role in promoting tolerance. It is where children learn and internalize values important to their life. Governments, educationists, and researchers have made some tremendous efforts to ensure that school is a place of effective tolerance education.*

Pendidikan dipandang sebagai cara yang paling efektif, dalam jangka panjang, yang memungkinkan berkembangnya toleransi antara orang-orang dalam masyarakat yang beragam. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi. Sekolah adalah tempat di mana anak belajar dan menginternalisasikan nilai-nilai penting untuk kehidupan mereka. Pemerintah, pendidik, dan peneliti telah membuat beberapa upaya luar biasa untuk memastikan bahwa sekolah adalah tempat yang efektif untuk pendidikan toleransi.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sikap toleransi siswa SMA di Sulawesi Utara dan khususnya kota Tomohon benar-benar terpelihara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya saling pengertian antara para siswa yang

berasal dari latar belakang budaya, etnis, agama dan bahasa yang berbeda. Sampai sekarang tidak pernah ada kejadian yang menunjukkan adanya konflik antar para siswa yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan latar belakang siswa.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk secara khusus meneliti tentang **“Pengaruh Internalisasi Nilai Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* Dalam Pembelajaran PKn terhadap Pengembangan Sikap Toleransi Siswa.”**

### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah penelitian adalah: Bagaimana Pengaruh Internalisasi Nilai Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* dalam Pembelajaran PKn terhadap Pengembangan Sikap Toleransi Siswa?

Mengingat luas dan kompleksnya penelitian ini, maka peneliti mengadakan pembatasan masalah penelitian. Adapun penelitian ini dibatasi pada pengaruh internalisasi nilai-nilai budaya dominan Masyarakat Sulawesi Utara, yaitu nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* dalam pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap pembelajaran PKn?
2. Adakah pengaruh nilai budaya *Mapalus* terhadap pembelajaran PKn?
3. Adakah pengaruh nilai budaya *Torang Samua Basudara* terhadap pembelajaran PKn?
4. Adakah pengaruh nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara* terhadap pembelajaran PKn?
5. Adakah pengaruh signifikan nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa?
6. Adakah pengaruh signifikan nilai budaya *Mapalus* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa?

7. Adakah pengaruh signifikan nilai budaya *Torang Samua Basudara* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa?
8. Adakah pengaruh signifikan pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa?
9. Adakah pengaruh signifikan nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara*, dan pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan informasi tentang pengaruh internalisasi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus* serta *Torang Samua Basudara* dalam pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menemukan:

1. Pengaruh nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap pembelajaran PKn.
2. Pengaruh nilai budaya *Mapalus* terhadap pembelajaran PKn.
3. Pengaruh nilai budaya *Torang Samua Basudara* terhadap pembelajaran PKn.
4. Pengaruh nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus*, dan *Torang Samua Basudara* terhadap pembelajaran PKn.
5. Pengaruh signifikan nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.
6. Pengaruh signifikan nilai budaya *Mapalus* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.
7. Pengaruh signifikan nilai budaya *Torang Samua Basudara* terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.
8. Pengaruh signifikan Pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.
9. Pengaruh signifikan internalisasi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara*, dan pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun lewat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis:**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya internalisasi nilai-nilai sosial budaya dalam pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan sikap toleransi siswa.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Menurut Poerwanto (2010:87) “Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak hanya terjadi secara vertikal atau kepada anak cucu mereka saja; melainkan dapat pula dilakukan secara horizontal atau manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya.” Oleh karena itu manfaat pertama dari penelitian ini adalah diketahuinya nilai-nilai sosial budaya Minahasa/Sulawesi Utara yang diinternalisasikan dalam pembelajaran PKn.
- b. Menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68) “PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.” Oleh karena itu manfaat kedua yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh internalisasi nilai-nilai sosial budaya Sulawesi Utara dalam pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.
- c. Menurut Gara (2009:67) “kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara adalah realita. Hal ini diakui baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar

Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama, ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.” Manfaat yang ketiga ialah diketahuinya hasil-hasil internalisasi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* serta *Torang Samua Basudara* dalam pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa.

#### **E. Struktur Organisasi Tesis**

Penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Internalisasi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* dalam Pembelajaran PKn terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa” ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan: berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II: Tinjauan Pustaka: menguraikan kerangka konseptual (*conceptual framework*) tentang ruang lingkup internalisasi nilai-nilai sosial budaya Sulawesi Utara, Hakekat pendidikan kewarganegaraan, sikap toleransi siswa, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian: berisi lokasi, populasi dan sampel penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan interpretasi data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: berisis temuan-temuan hasil penelitian, pembahasan dan pengujian hipotesis.

Bab IV Kesimpulan dan Saran





